

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya

Ade Iskandar

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara

Eka Suaib

Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

Malik

Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)

H. Muh. Amir

Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis Single Identity di Kabupaten Lampung Utara

Nia Janati

Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program *Rural Infrastructure Support* PNPM Provinsi Lampung

Selvi Diana Meilinda

Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

Yadi Lustiadi



# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

### **Pembina**

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

### **Penanggung Jawab**

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

### **Ketua Penyunting**

Dr. Malik, M.Si

### **Penyunting Ahli**

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

### **Penyunting Pelaksana**

Dra. Azima Dimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

### **Tata Usaha**

Winda, SE

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

### **Alamat Redaksi**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

### DAFTAR ISI

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya	1-13
<b>Ade Iskandar</b>	
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara	14-29
<b>Eka Suaib</b>	
Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang	30-46
<b>Malik</b>	
Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)	47-60
<b>H. Muh. Amir</b>	
Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis <i>Single Identity</i> di Kabupaten Lampung Utara	61-70
<b>Nia Janati</b>	
Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program <i>Rural Infrastructure Support</i> PNPM Provinsi Lampung	71-87
<b>Selvi Diana Meilinda</b>	
Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara	88-101
<b>Yadi Lustiadi</b>	

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA  
OLEH  
ADE ISKANDAR, DOSEN STISIP TASIKMALAYA**

---

**ABSTRACT**

*Implementation of Agricultural Development in Tasikmalaya District implemented by Regional Regulation No. 13 Year 2011 on Medium Term Development Plan Tasikmalaya Regency Year 2011-2015 which brings consequences on the implementation of one of its mission Tough Economy Brought to the Rural-Based Agribusiness Excellence. In terms of implementation of agribusiness development in Tasikmalaya district requires the existence of some things as proposed Jones (1996: 105), among others Organization; Interpretation; and Application. Organizational structuring begins with basic tasks and functions of each relevant agencies, structuring the management of natural resources, human resources and other resources, including facilities and infrastructure. Interpretation of the policies of agribusiness development in Tasikmalaya regency which translated into a plan and direction. Policy agribusiness development in Tasikmalaya district is translated into strategic plans of each regional organization concerned. Application of agribusiness development policies carried out by structuring a more quality service provision.*

*Keywords: Policy Implementation*

**A. Pendahuluan**

Pertanian terutama pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sektor primer di Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Sebagai konsekuensi logisnya maka seluruh kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk akselerasi pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya. Visi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 menyebutkan bahwa Visi Kabupaten Tasikmalaya adalah "Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, unggul dan mandiri berbasis perdesaan". Dengan visi tersebut Kabupaten Tasikmalaya memiliki misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak-ulkarimah, Berkualitas dan Mandiri .

2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis.
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
4. Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah/Perdesaan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan.

Untuk mencapai misi mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis, perlu dirumuskan program-program untuk mendukung agar misi tersebut dapat tercapai. Untuk itu kebijakan pembangunan bidang pertanian lebih dititik beratkan tidak hanya pada aspek intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi pertanian tetap juga membawa produksi pertanian sebagai produk yang mampu memiliki pasartidak hanya di dalam negeri tetapi juga pasar ekspor.

Untuk mencapai keberhasilan pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya sangat ditentukan tidak hanya oleh performa salah satu sektor saja tetapi juga oleh sektor lainnya. Sinergiantar sektor, sinergipemerintah dan masyarakat (termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya.

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan pengembangan agribisnis antara lain akses pasar untuk produk-produk agribisnis yang masih terbatas, serta dukungan permodalan dan pengembangan potensi lokal yang masih rendah.

Memperhatikan permasalahan tersebut, perlu diupayakan mencari penyebab dari permasalahan tersebut.

## **B. Landasan Teori**

Pengertian dari istilah kebijakan (*policy*) telah banyak dijelaskan oleh para pakar sebagaimana yang dikemukakan dalam Islamy (2003 : 15-17), antara lain menurut Lasswell memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. "...a projected program of goals, values and practices". Edward dan Sharkansky (dalam Islamy, 2003 : 18), "*Public policy is what governments say to do or not to do. It is the goals of purpose of government program*". Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah yang sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagai suatu program pencapaian tujuan, yang terarah yang dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Mazmanian dan Sabatier (1983 : 20) mengemukakan bahwa: "*Implemen-tation*

*is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions.* Selain itu Mazmanian dan Sabatier (1983 : 4) menjelaskan makna implementasi bahwa : "*To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impact on people and events*".

Mazmanian dan Sabatier (1983 : 4) lebih lanjut mengemukakan bahwa : "*This definition encompasses not only the behavior of the administrative body which has responsibility for the program and the compliance of target groups, but also the web of direct and indirect political, economic and social forces that bear intended and unintended of the program*".

Jones (1996 : 82) mengartikan implementasi sebagai "*Getting the job done and doing It*". Jones menyebutkan bahwa implementasi adalah *a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done.* Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi merupakan proses yang dapat dilakukan dengan mudah.

Dye (2002 : 50) mengemukakan bahwa *Implementation involves all of the activities designed to carry out the policies by the legislative branch.* Pendapat lain mengenai implementasi menurut Van Meter dan Horn (dalam Wahab, 2001 : 65) mengungkapkan bahwa implementasi sebagai "*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*".

Mustopadidjaja (1998:10) mengemukakan bahwa : "Proses implementasi

kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dan program (kebijakan) yang ditetapkan semula. Pencapaian tujuan kebijakan memerlukan adanya pemahaman yang arif terhadap konteks lingkungan khusus (*specific environmental context*) atau kapabilitas lingkungan (*ecological capacity*) dimana kebijakan itu diperhatikan.

Dunn (1994 : 71), mengemukakan bahwa : "Sistem kebijakan melalui mana kebijakan dibuat, mengandung tiga elemen yang mempunyai hubungan timbal balik : kebijakan publik, peran pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan".

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan pernah bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2001 : 71) berpendapat bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna, maka diperlukan beberapa syarat tertentu, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Gejala inilah yang oleh Dunsire (1978:61) dinamakan sebagai *implementation gap*. Suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut akan tergantung pada apa yang oleh Williams (1983:75) menyebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* adalah kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau



sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Jones mengemukakan bahwa pelaksanaannya memerlukan adanya beberapa syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Jones (1996 : 105) lebih lanjut mengemukakan bahwa aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam antara lain :

1. *Organization ; the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect.*
2. *Interpretation ; the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*
3. *Application; the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.*

Jones menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari proses pembentukan atau penataan sumber daya, unit dan metode untuk menempatkan kebijakan yang berlaku, menterjemahkan ke dalam rencana yang dapat diterima dan layak serta tersedianya penyediaan pelayanan, dan kesepakatan dalam pencapaian tujuan.

Hogerwerf (1978:157) menegaskan bahwa “agar suatu kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Adapun dalam pelaksanaannya diperlukan tindakan-tindakan atau sarana-sarana yang dipilih disesuaikan dengan tujuan yang dipilih dan ingin direalisasikan”. Selanjutnya Hogerwerf (1978:168) mengemukakan empat aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, yaitu: (1) isi kebijakan, (2) informasi, (3) dukungan, dan (4) pembagian potensi.

Menurut Goggin, dkk. (dalam Rahmat, 2009:144) implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Implikasi dari penjelasan tersebut, menurut Islamy (2003:19) adalah:

1. Bahwa kebijakan negara, selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada beberapa tujuan tertentu.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan negara itu adalah dapat bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau dapat bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, didalamnya mencakup manusia, dana dan kemampuan organisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok). Dalam proses implementasi kebijakan, sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pelaksana, lebih dari itu menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung

maupun tidak, dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik, atau antara visi dengan realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasi. Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya kualitas pelaksana yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Oleh karena itu Grindle (dalam Tachjan, 2008: xiv) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar yang tiap kali muncul dalam implementasi kebijakan, yakni : (1) ketiadaan kerjasama vertikal antara atasan dan bawahan; (2) hubungan kerja horisontal yang tidak sinergis; (3) masalah penolakan terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Untuk mengatasi hambatan ini, maka pelaksana kebijakan publik perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi sosial yang berkembang. Berbeda dengan formulasi kebijakan publik yang mensyaratkan rasionalitas dalam membuat keputusan, keberhasilan implementasi publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Berbeda dengan Gow dan Morss (dalam Keban 2004: 73) mengemukakan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan antara lain: (1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrasi, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi,

(6) pengaturan waktu (timing), (7) sistem informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor, dan (9) dukungan yang berkesinambungan. Semua hambatan ini dapat dibedakan atas hambatan dari dalam dan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti SDM, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya, dan sebagainya.

Menurut Mustopodidjaja (dalam Rahmat, 2009:146) beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, yaitu: (1) ketepatan kebijakan itu sendiri, (2) konsistensi dan efektifitas pelaksanaannya, dan (3) terjadi tidaknya perkembangan di luar perkiraan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* sekaligus. Pendekatan *top-down* terutama berfokus pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi); standar pelaksanaan; kewenangan; koordinasi; dan lain-lain. Pendekatan *bottom-up* menekankan pada strategi-strategi yang digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik untuk memahami kebijakan publik tersebut secara keseluruhan (Adiwisastra, dalam Tahejan, 2008: xiv).

Menurut Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (2009:86) mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai



tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan, bisa diartikan sebagian penyediaan saran untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dengan demikian implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit Presiden).

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (*Governmental Units*), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan. Untuk menghindari pertentangan atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional sebagai acuan pelaksanaannya.

Pendapat dari Putra (2001:84) menyimpulkan hakekat dari implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

Implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (*target group*), namun juga perlu memperhatikan secara cermat

jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dengan bertumpu pada pendapat para ahli, maka dapat diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*out-comes*), dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Pelaksanaan kebijakan merupakan satu konsekuensi dari pada adanya tuntutan akan kebijakan dan tuntutan ini bukan sekedar tuntutan akan eksistensi atau terbentuknya kebijakan, melainkan sampai dilaksanakan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya tata cara dan keserasian agar pelaksanaan dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna dengan optimal tidak efesiennya kebijakan terletak pada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini termasuk kekurangan dan kelemahan para aktor pelaksanaan kebijakan, keadaan lingkungan dan sebagainya.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi internal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau

hasil akhir yang telah ditentukan dengan demikian suatu kebijaksanaan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijaksanaan sebagai pelaksanaan yang jelek.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Dengan demikian, maka setiap kebijakan pemerintah seharusnya mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana

yang ada dalam lingkungan dan politiknya. Dalam setiap studi kebijakan, maka aspek lingkungan harus memperoleh pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga tidak bertentangan dengan fungsi negara atau pemerintah itu sendiri.

Pendapat tersebut diperoleh gambaran bahwa implementasi dapat dipandang sebagai proses atau *general process* yang dilakukan setelah suatu tujuan ditetapkan. Kegiatan itu terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan, sehubungan dengan hal ini dikemukakan oleh Wibawa (1994:35) bahwa implementasi kebijakan pada dirinya sendiri mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan alternatif-alternatif yang abstrak atau makro. Sedangkan formulasi kebijakan dalam pengertiannya yang steril, merupakan proses yang memiliki logika *bottom up* dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian alternatif cara pemecahannya.

Pengembangan agribisnis adalah pengembangan potensi pertanian menjadi bisnis yang cukup diandalkan terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar penduduknya adalah petani.

Menurut Soekartawi (1991:2), agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.

Peran agribisnis menurut Soekartawi (1994: 63) adalah :

1. Mampu meningkatkan pendapatan petani.
2. Mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
3. Mampu meningkatkan ekspor.
4. Mampu meningkatkan tumbuhnya industri yang lain.
5. Mampu meningkatkan nilai tambah.

Dengan demikian bahwa, agribisnis merupakan salah satu usaha produktif yang dapat menjadi mata rantai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang menjalankan kegiatan tersebut.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif (*Descriptif research*). Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

### D. Pembahasan

Potensi pengembangan agribisnis yang dimiliki oleh Indonesia tersebar hampir merata di seluruh daerah dalam wilayah negara kesatuan ini. Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunannya terutama pembangunan pertanian akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengantisipasi perubahan situasi dunia. Pengembangan agribisnis dapat dijadikan pemicu pembangunan pada

berbagai sektor dan andalan dalam mengumpulkan sumber dana pembangunan daerah bagi hampir seluruh daerah di Indonesia. Demikian juga dengan Kabupaten Tasikmalaya yang kaya akan potensi produksi pertanian baik pertanian pangan maupun pertanian hortikultura. Sektor pertanian daerah ini merupakan salah satu potensi andalan dalam memperoleh pendapatan asli daerah.

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 2.708,81 km<sup>2</sup> atau 270.881 ha, secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 – 2031. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan salah satu sasaran yaitu tertatanya kawasan yang berfungsi sebagai hutan lindung dan budidaya. Kawasan budidaya di Kabupaten Tasikmalaya seluas ± 191.001,66 Ha dan untuk kawasan pertanian memiliki lahan yang cukup besar yaitu : kawasan pertanian lahan basah seluas 52.347,23 ha dan kawasan pertanian lahan kering seluas 47.194,82 ha.

Kawasan peruntukan pertanian berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri kawasan peruntukan tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 49.556 ha, kawasan peruntukan hortikultura seluas kurang lebih 1.196 ha terdiri atas beberapa komoditas unggulan terdiri atas kawasan komoditas manggis, salak, pisang, durian, dan cabe merah.

Memperhatikan visi Kabupaten Tasikmalaya “Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, unggul dan mandiri berbasis perdesaan” dan salah satu misinya yaitu “Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis”, dan luasnya

kawasan pertanian yang cukup memadai serta memiliki potensi unggulan disamping adanya padi organik juga ada komoditas unggulan lainnya yaitu manggis, salak, psang, durian dan cabe merak maka agribisnis menjadi potensi ekonomi yang cukup baik bagi Kabupaten Tasikmalaya.

Implementasi pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya apabila di kaji menurut teori Jones dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Organisasi (*Organization*)

Untuk melaksanakan pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya dimulai dengan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode untuk menempatkan kebijakan yang berlaku. Untuk mencapai misi Kabupaten Tasikmalaya mewujudkan perekonomian yang tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis, perlu penataan sumber daya dimulai dari penataan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya termasuk sarana dan prasarana. Penataan sumber daya alam dilakukan melalui penetapan komoditas unggulan pertanian antara lain di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011–2031. Komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berorientasi ekspor antara lain: Padi Organik (SRI) dengan sentra di 7 (tujuh) Kecamatan. (Sukaresik, Cisayong, Sukaraja, Manonjaya, Cineam, Sukahening dan Salawu), Manggis dengan sentra di Puspahiang, Mendong dan Golok Galonggong Manonjaya. Sedangkan komoditas unggulan pertanian yang belum memiliki pasar ekspor antara lain komoditas salak yang meliputi Kecamatan Cineam, Manonjaya, Cibalong, Gununganjung, Karangjayadan Parungponteng. komoditas pisang meliputi :Kecamatan Cipatujah, Pancatengah, Culamega, Sodonghilir,

Jatiwaras, Salopa dan Cineam. Komoditas durian meliputi Kecamatan Salopa, Jatiwaras, Cikatomas dan Sukaraja. komoditas cabe merah meliputi Kecamatan Cigalontang, Leuwisari, Sariwangi, Padakembang, Cisayong, Sukahening, Sukaratu, Taraju, Sodonghilir, Bojonggambir, Puspahiang dan Salawu.

Penataan sumber daya lainnya antara lain adalah penataan infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana pertanian.. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Potensi sumber daya air di Kabupaten Tasikmalaya yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum optimal.

Untuk mendukung pengembangan agribisnis telah dilaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta sumberdaya air, yang kegiatannya antara lain operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pemerintah maupun irigasi perdesaan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembinaan kepada P3A/GP3A Mitra Cai serta pengelolaan Daerah Irigasi dan Situ. Pemerintah Daerah telah berhasil meningkatkan jumlah bendung, memperbaiki saluran air, menambah luas sawah irigasi desa, dan meningkatkan jaringan transportasi untuk mempermudah akses memperoleh bahan baku dan melakukan pemasahan hasil produksi pertanian.

Penataan sumber daya manusia meliputi peningkatan kemampuan petani

penggarap dan petani pemilik. Tingkat kepemilikan lahan petani yang relative terbatas (kurang dari 0,5 Ha) menyebabkan penataan sumber daya manusia yang dilakukan tidak hanya kepada petani pemilik tetapi juga kepada petani penggarap. Penyuluhan yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya melalui penyuluh-penyuluh di lapangan telah melakukan penyuluhan secara merata ke tiap-tiap kecamatan, Database kelompok tani umumnya sudah tersusun di masing-masing UPTD pertanian. Namun meskipun demikian skala usaha pertanian masih relative terbatas antara lain disebabkan permodalan.

Penataan organisasi dilakukan melalui koordinasi antar intitusi lintas sektoral dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan aktivitas usaha agribisnis hulu sampai hilir masih perlu ditingkatkan. Koordinasi antara lain dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupa penyuluhan pengolahan hasil-hasil pertanian agar memiliki pangsa pasar dan hasil produksi pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah tetapi sudah barang jadi yang memiliki nilai ekonomi yang lebih. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya pengembangan usaha agribisnis perdesaan, input produksi pertanian relatif terbatas; pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha serta penerapan teknologi tepat guna masih terbatas diakibatkan oleh terbatasnya sarana prasarana, rendahnya SDM petani, terbatasnya penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya.

#### b. Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi terhadap kebijakan pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya yang diterjemahkan ke dalam bentuk rencana dan arahan. Sektor

pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja Kabupaten Tasikmalaya terbesar, yaitu sekitar 43,22% kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti perdagangan 24,75 %, dan jasa-jasa 11,08 %. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kebijakan pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya sudah diterjemahkan ke dalam rencana strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait, antara lain Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Bina Marga, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang mengurangi produksi dan produktivitas hasil pertanian, Dinas Tata Ruang sangat berhati-hati dalam memberikan rekomendasi fatwa pengarah lokasi agar jangan sampai lahan pertanian produktif terutama yang menggunakan irigasi teknis di alih fungsikan. Selain itu Dinas Bina Marga telah berupaya untuk menyediakan infrastruktur pertanian antara lain menyediakan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk membantu sector pertanian. Dinas Pertanian Tanaman Pangan berupaya memberikan penyuluhan kepada petani agar kualitas produk yang dihasilkan meningkat, berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kemandirian lembaga kelompok tani. Peningkatan

pemanfaatan lembaga penjamin / UE Puntuk hasil produksi dan pasca panen serta bekerjasama dengan lembaga penelitian di Perguruan Tinggi untuk mengadakan penelitian untuk menghasilkan bibit dan produk unggulan. Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan membantu dalam hal memberikan penyuluhan agar hasil pertanian meningkatkan nilai ekonominya produk yang dijual di proses kembali melalui pengolahan dan pengemasan.

c. Aplikasi (*Application*),

Aplikasi dari kebijakan pengembangan agribisnis berupa penyediaan pelayanan secara rutin, adanya kompensasi dan kesepakatan terhadap tujuan yang hendak di capai. Tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya antara lain adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan, meningkatkan akses pasar untuk produk-produk agribisnis dan mengembangkan usaha agribisnis perdesaan berdasarkan potensi lokal dengan dukungan permodalan, telah disepakati bersama dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Berdasarkan pengamatan, untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan upaya-upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dengan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tiap tahunnya.

Sebagai penopang dari upaya pencapaian tersebut dilakukan upaya peningkatan pelayanan bagi pelayanan administratif antara lain mengenai perijinan yang dilaksanakan oleh Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu, pelayanan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi tersebut. Namun kendala pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya masih menemui kendala antara lain masih belum adanya kawasan tanaman hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan, belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik, serta lahan pertanian yang berkurang kesuburannya akibat penggunaan pupuk organik dalam waktu yang lama, belum disertifikasinya produksi buah-buahan lokal, masih rendahnya pengembangan usaha ekonomi produktif yang menggunakan bahan baku hasil produksi pertanian, masih rendahnya manajemen pengelolaan usaha pertanian dan jaringan informasi serta akses pasar ke tingkat nasional maupun internasional masih perlu di tata.

## E. Kesimpulan

Implementasi pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu perwujudan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, dimana salah satu misinya adalah Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis. Upaya pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah tersebut telah dilakukan dengan menata berbagai komponen antara lain menata organisasi dengan dimulai dari penataan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkait, penataan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya termasuk sarana dan prasarana. Melakukan

interpretasi terhadap kebijakan pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya yang diterjemahkan ke dalam bentuk rencana dan arahan. Kebijakan pengembangan agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya diterjemahkan ke dalam rencana strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait. Aplikasi dari kebijakan pengembangan agribisnis dilakukan dengan penataan penyediaan pelayanan secara lebih berkualitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis, an Introduction*. New Jersey : Prentice-Hall.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Edward III, C. George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra.
- Islamy, Irfan, M. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. *An Introduction to the Study of Public Policy*, Wads Worth, Inc.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA : Foresman Company.
- Mustopadidjaja, AR. 1998. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Alex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya : Pustaka Pelajar.
- Soekartawi, 1991, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soekartawi, 1994. *Teori Ekonomi Produksi ; Dengan Pokok Bahasan analisis Fungsi Cobb-Douglas*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tachyan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Van Metter, Donalds and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptional Framework. Administration and Society*. Vol. 6 No. 4 February.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Peraturan Perundang-undangan :
1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Kabupaten  
Tasikmalaya Tahun 2011-2015  
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012  
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 –  
2031.

ISSN : 2443-1214

**e-JKPP**

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

**Diterbitkan Oleh :**  
**Program Pascasarjana**  
**Magister Ilmu Administrasi**  
**Universitas Bandar Lampung**

